

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pembentukan KPK DKI Hanya Habiskan Anggaran

KINERJA Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI menuai sorotan. DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja Komite Pencegahan Korupsi (KPK) yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan pada 2018 silam.

Pasalnya, lembaga yang menelang dana Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar itu tak terdengar eksistensinya

“Kami mempertanyakan sudah adakah langkah dan target dari KPK DKI itu. Saya belum pernah mendengar eksistensinya. Padahal anggaran yang dikucurkan dari APBD cukup besar,” ungkap Manuara Siahaan, anggota DPRD DKI Jakarta kepada wartawan di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, tidak mengerti mengenai tugas dari lembaga tersebut. Padahal, seharusnya telah ada langkah konkret, target dan hasil kerja yang diharapkan supaya bisa dinilai kinerjanya yang hampir dua tahun ini.

Apalagi, sambung Manuara, saat itu Tim Ahli Gubernur total memakan anggaran hingga Rp28 miliar dari APBD. “Harusnya mereka punya dulu tupoksinya. Tupoksinya apa, target mereka apa, output akhirnya apa. Kalau Gubernur yang lalu, karena pembiayaannya menyangkut uang operasional gubernur kita nggak perlu tanya. Tapi kalau sekarang menggunakan uang APBD, kita wajib tahu. Masyarakat wajib tahu. Ujung akhir dari yang mereka kerjakan itu apa, outputnya harus jelas,” papar dia.

Manuara juga menilai, tugas KPK bentukan Gubernur Anies Baswedan itu tumpang tindih dengan lembaga Inspektorat Jakarta sebagai pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belum lagi, di pemerintahan DKI juga ada Asisten Sekretaris Daerah yang bertugas memberi masukan terhadap program-program pemerintah daerah.

Bahkan, nomenklatur anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) masuk pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta Misan Syamsuri mengatakan, pembentukan KPK dari TGUPP Pemprov DKI merupakan hal yang sia-sia.

Pasalnya, Pemprov DKI sendiri telah memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingkat provinsi yang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk pencegahan korupsi.

Politisi Partai Demokrat itu menyarankan, lebih penting Pemprov DKI untuk membentuk lembaga seperti pencegahan narkoba, sebab ibu kota saat ini diduga masuk zona merah penyalagunaan narkoba.

“Sebetulnya menurut saya yang penting itu seperti pencegahan narkoba. Kalau korupsi, kan KPK sendiri sudah ber Kantor di gedung Pemprov DKI. Jadi nanti apa ini maksudnya,” tandas dia di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Menurut Misan, KPK bentukan Gubernur Anies bukanlah hal yang krusial. Sehingga tidak adanya komite ini, tidak menjadi masalah bagi DKI.

Sedangkan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya meminta KPK DKI bentukan Anies harus benar-benar bekerja. “Jangan makan gaji buta dong (KPK DKI Anies-red),” tandas dia saat dihubungi, Kamis (19/9/2019).

Sementara itu, Prof Dr Suparji Ahmad dari Universitas Al Azhar Indonesia menuturkan, pencegahan merupakan ukuran atau standar dalam pemberantasan korupsi. “Namun, mindset di

publik itu berhasil, tetapi bertolak belakang. Faktanya di DKI, opini selama ini baik,” tutur dia di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Suparji mengatakan, tidak ada PNS/ASN tersangkut kasus hukum dan menimbulkan kerugian terhadap negara. Dan itu dapat dikatakan berhasil itu standar. “Tapi dugaan kita tidak tahu persis. Karena non struktural dan bukan bagian dari pemerintah,” tandas dia.

Tapi semua itu, kata dia, sejauh mana peran-peran yang ada dan sinergitas petugas selama ini. Tapi lanjut dia, patut diapresiasi, sebab ukurannya tergantung dari tupoksinya. Pencegahan merupakan sosialisasi agar orang tidak melakukan korupsi. “Kenyataannya, realitasnya selama ini positif,” kata dia.

Tetapi jika ada boombastisnya dan prestisius atau mengakibatkan kerugian negara mendorong orang untuk tidak korupsi belum ada kenyataannya. Selain itu, juga bukti-bukti kinerja KPK DKI selama ini belum ada, kemungkinan karena publik belum tahu, karena tidak familiar. “Masih perlu ada penguatan agar publik percaya,” kata Suparji. (aen/ibl)